

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penerapan barcode M Pertamina dalam pembelian BBM subsidi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi yang mengatur pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina. Penerapan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi di Kabupaten Semarang merupakan bagian dari upaya modernisasi distribusi energi nasional yang bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran. Secara normatif, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, serta berbagai regulasi turunan dari Kementerian ESDM dan Pertamina. Penggunaan barcode ini juga selaras dengan prinsip negara hukum dalam menciptakan pemerataan hak atas energi bagi seluruh rakyat.
2. Bagaimana penyimpangan dan penegakan hukum dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina. Secara yuridis, penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana, baik berdasarkan Pasal 55 UU Migas maupun Pasal-Pasal KUHP seperti Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 480

tentang penadahan. Kepolisian berperan penting dalam menegakkan hukum melalui proses penyidikan, pengawasan lapangan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang merugikan keuangan negara dan mengganggu distribusi subsidi yang adil. Penerapan sistem barcode memerlukan penguatan sistem dan pendekatan multidimensi, yaitu tidak hanya melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui edukasi hukum dan literasi digital, khususnya kepada kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pengusaha kecil. Selain itu, perlu peningkatan kerja sama lintas sektor antara Pertamina, Kepolisian, BPH Migas, dan pemerintah daerah untuk membangun sistem pengawasan yang responsif dan terpadu.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan barcode My Pertamina dalam pembelian BBM subsidi :

1. Disarankan agar pemerintah dan PT. Pertamina melakukan optimalisasi infrastruktur digital, termasuk memperluas jaringan internet dan menyediakan layanan bantuan teknis di SPBU.
2. Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait mekanisme pendaftaran barcode, konsekuensi hukum penyalahgunaan, tempat layanan pengaduan, serta hak dan kewajiban pengguna BBM subsidi. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme alternatif atau manual bagi kelompok masyarakat yang benar-benar tidak memiliki akses terhadap perangkat digital, tanpa membuka celah

penyalahgunaan.

3. Aparat penegak hukum di Kabupaten Semarang harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan barcode, termasuk melalui penindakan terhadap mafia BBM dan oknum SPBU yang terlibat. Penegakan hukum ini harus dilakukan secara tegas dan transparan agar menimbulkan efek jera. Bisa juga dengan memberikan penghargaan kepada pihak SPBU dalam menangani atau mencegah penyalahgunaan sistem barcode My Pertamina.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan sistem barcode My Pertamina dalam pembelian BBM subsidi benar-benar dapat menciptakan keadilan distribusi energi, mencegah kerugian negara, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang.